Haviluddin Terpilih Secara Aklamasi

Konferwil Tiga Pengurus Wilayah ISNU Kaltim

Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdalatul Ulama (PW ISNU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) ketiga di Gedung ILab Unmul, Senin (10/6).

TUGAS: Haviluddin ketua terpilih PW ISNU periode 2024–2029. Foto kanan, di akhir kegiatan para pimpinan pusat ISNU dan Kaltim serta tamu di momen kebersamaan.

SAMARINDA – Hasil konferwil tersebut yakni menunjuk Haviluddin sebagai ketua PW ISNU Kaltim secara aklamasi untuk periode 2024–2029.

Sementara itu, Mandatarik PW ISNU Kaltim terpilih Haviluddin dalam sambutannya mengatakan, PR yang diberikan PW ISNU kepadanya tidak ringan, terkait pentingnya konsolidasi, penyegaran organisasi, juga membangun visi-misi yang lebih futuristik bagi ISNU, dan bagaimana ISNU bisa bersinergi bersama semua pihak. "Oleh sebab itu, meski sangat berat, saya harus memikul mandat, tetapi saya mohon kepada Allah SWT semoga niatan kami lebih diperkuat, kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah bagian dari perjuangan, maka perjuangan adalah memberikan kontribusi yang nyata dan mampu mendinamisasikan ISNU," kata Haviluddin.

Ditambahkan Haviluddin, pada Konferwil ketiga PW ISNU yang merupakan majelis tertinggi bagi PW ISNU Kaltim, kegiatan itu terkait pemilihan ketua dan pembahasan rekomendasi tentang program yang akan dijalankan pada periode 2024–2029. PW ISNU punya peran penting bagi Kaltim dalam berkontribusi terhadap pembangunan IKN, dan meningkatkan kualitas SDM dalam menyang keberadaan IKN.

"Apa yang telah disampaikan ketua PP ISNU berpesan agar segera membentuk kepengurusan baru periode 2024–2029 dengan mengikutsertakan pengurus yang berasal dari unsur akademisi (termasuk birokrat), ulama, pengusaha (profesional, dewan), aktivis," terangnya. "Program kerja yang akan dilerjakan selama lima tahun terdiri transformasi intelektual, transformasi organisasi, transformasi ekonomi, dan transformasi spiritualitas," sambungnya.

Haviluddin berharap PW ISNU secara bersama-sama mempalankan roda organisasi, seiring perkembangan kondisi dunia yang cepat berubah.

Di akhir penyampaiannya, Haviluddin mengungkapkan sangat bersyukur dan bertesima kasih atas amanah tersebut. "Saya yakin dengan dukungan dan kerja sama seluruh anggota ISNU, dapat mencapai berbagai prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PP ISNU Prof Ali Masykur Musa menyebut, melalui konferwil tersebut, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan bisa sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Mengingat Kaltim adalah daerah penyangga IKN. "ISNU punya peran yang penting, baik dalam berkontribusi terhadap pembangunan IKN dan meningkatkan kualitas SDM menyelang IKN," kata Ali.

Hasil dari konferwil tersebut juga diharapkan bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan bisa sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Mengingat Kaltim adalah daerah penyangga IKN. "ISNU punya peran yang penting, baik dalam berkontribusi terhadap pembangunan IKN dan meningkatkan kualitas SDM menyelang IKN," kata Ali.

Hasil dari konferwil tersebut juga diharapkan bisa memberikan kontribusi besar kepada kebutuhan daerah, agama, dan masyarakat.

Ketua PW ISNU Kaltim Prof Susilo Ma'ruf yang mengabat ketua masa priode pertama medio 2013–2018 lanjut periode 2018–2023 untuk periode dua mengatakan, secara pribadi mengucapkan terima atas kepercayaannya. "Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada pengurus baru dapat membawa semangat dalam rangka cita-cita kita bersama membesarkan ISNU," tegasnya.

Ke depan, berharap seluruh anggota bisa aktif dan tanggap dalam berbagai permasalahan. Pemikiran anggota ISNU Kaltim juga dibutuhkan untuk mewujudkan program yang dicanangkan.

Oleh karna itu, Susilo berharap kepada pengurus yang baru dilantik, agar tumbuh dari kaum intelektual dan cendekiawan NU dapat menjalin sinergi dengan pemerintah, dalam mendukung pembangunan untuk kemajuan daerah. (adv/kh/dra)

Sosialisasi Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

BHP Surabaya Bersama Kanwil Kemenkumham Kaltim

SOSIALISASI: Penatausahaan uang pihak ketiga Balai Harta Peninggalan Surabaya. Foto bawah, di sesi kegiatan para peserta menyempatkan momen luar biasa.

SAMARINDA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kaltim bersama Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di lawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menggelar sosialisasi penatausahaan uang pihak ketiga, digelar di Ballroom Sterin Hotel Samarinda, Selasa (11/6).

Dalam sambutannya, Oun Gun Gunawan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait karena telah memilih Samarinda sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi.

"Sosialisasi menjadi sangat penting bagi warga di Kaltim dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengertian BHP, yang manfaat bagi sebagian masyarakat atau stakeholder maupun instansi lain masih tertinggal jauh, dan belum memahami tugas dan fungsinya," jelasnya.

Ditambahkan Oun Gun Gunawan, Kaltim dan Kaltara masuk sebagai salah satu wilayah kerja dari BHP Surabaya, sehingga permohonan atau pemberitahuan masyarakat, stakeholder atau instansi terkait sehubungan dengan tugas dan fungsi BHP Surabaya, wajib disampaikan kepada BHP Surabaya. BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk fungsi penyelesaian penatausahaan uang. "Pihak ketiga meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai penyerahan ke kas negara. Penatausahaan uang pihak ketiga diperlukan untuk mewujudkan tata administrasi yang tertib terhadap pengelolaan uang pihak ketiga," sambung Oun Gun.

Dalam menjalankan fungsi penatausahaan uang pihak ketiga, BHP memiliki tugas melindungi hak kepentingan subjek hukum meliputi, orang yang tidak diketahui keberadaannya, atau dinyatakan tidak hadir, tidak adanya pihak yang ditunjuk untuk menerima atau mengelola harta peninggalan, tidak melakukan maupun wanprestasi dan ahliwaris yang belum diketahui keberadaannya," tambahnya.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, penting untuk diperhatikan bahwa pendistribusian uang pihak ketiga, semisal dana transfer, manfaat jaminan hari tua (JHT), dan manfaat pensiun harus diberikan secara tepat sasaran. Hal itu dilihat dari ketentuan Pasal 519 KUH Perdata, di mana dana-dana tersebut merupakan benda bertuan dan dapat dipindahkan atau dialihkan. Oleh sebab itu, hak yang melekat atas harta tersebut harus dilindungi dan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pemilik atau penerima hak.

Melalui BHP, negara hadir dan memberikan perlindungan terhadap hak keperdatan atas manfaat pensiun, manfaat JHT dan transfer dana yang tidak diketahui keberadaan peserta penerima, tidak menunjuk kuasa atau wasiat, serta adanya ahli waris namun tidak diketahui keberadaannya.

"Dalam melaksanakan tugasnya, BHP perlu berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang berwenang dalam kepengurusan dana-dana pihak ketiga, semisal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPTS Ketenagakerjaan dan PT Taspen," imbuhnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan menjalin sinergitas antar lembaga atau instansi terkait dan masyarakat dalam upaya penegakan dan pelayanan hukum yang optimal nantinya. Selain itu, BHP Surabaya dapat mengurangi permasalahan yang dapat timbul dalam penatausahaan uang pihak ketiga.

Sementara itu, Kepala BHP Surabaya Hendra Andy Satya Gunning membeberkan, tujuan kegiatan tersebut adalah terciptanya pemahaman dan persepsi serta literasi yang sama kepada stakeholder terkait mengenai tugas dan fungsi BHP, khususnya pelaksanaan fungsi penatausahaan uang pihak ketiga terhadap transfer dana, manfaat pensiun dan manfaat jaminan hari tua yang tidak diketahui keberadaan peserta penerima, tidak menunjuk adanya kuasa atau wasiat serta adanya ahli waris namun tidak diketahui keberadaannya, mengenalkan tugas dan fungsi BHP Surabaya agar masyarakat Kota Tepian dan sekitarnya, serta mengetahui bahwa BHP Surabaya hadir untuk memberikan pelayanan bidang di Bumi Etam termasuk di Samarinda yang menjadi wilayah kerjanya.

Oleh karna itu, Hendra berharap sosialisasi tersebut menghasilkan pemahaman secara nasional maupun lokal, terwujudnya persamaan persepsi dalam mewujudkan perlindungan hak keperdatan atas transfer dana, manfaat JHT, dan manfaat pensiun yang berkepastian hukum dalam penatausahaan uang pihak ketiga. (adv/kh/dra)

Ayo Gabung di SMK TI Labbaika Samarinda

SAMARINDA – Labbaika Samarinda yang saat ini memiliki empat tingkatan, siap memberi kesempatan bagi calon siswa bergabung dan lah cita-cita.

Pendaftaran sudah dibuka untuk kelompok belajar (KB), taman kanak-kanak (TK), madrasah ibtidaiyah (MIs), dan sekolah menengah kejuruan teknologi informasi (SMK TI) lewat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.

Ahmad Ade Sulaiman

Kepala Sekolah Labbaika Ahmad Ade Sulaiman menginformasikan bahwa untuk mendaftar dipersilakan datang ke sekretariat dari masing-masing tingkatan, atau menghubungi 08125515261. Anda juga bisa akses informasi lewat labbaika.schools.sekolah.id, Facebook MTs Labbaika Samarinda. "Semua jenjang tingkatan pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis," ucap Ahmad Ade.

Menariknya lagi, empat tingkatan sekolah Labbaika sudah mendapatkan akreditasi A dalam kategori sangat baik. "Artinya sekolah melahirkan generasi unggul, berakhlak, dan berprestasi," kata Ahmad Ade Sulaiman.

Pendaftaran sudah buka mulai pukul 09.00–14.00 Wita setiap hari, kecuali Minggu. "Ada beberapa ekstakurikuler dan organisasi yang kami tawarkan, di antaranya OSIS, MPK, pramuka, paskibra, PMR, futsal, pencak silat, seni musik, seni tari, rebana, MTQ, kaligrafi, hola wali, basket dan sebagainya, semua tersedia," sambungnya.

Sebagai informasi, bagi orangtua dan adik-adik bisa langsung datang ke alamat sekolah di jalan KH Harun Nafsi, Kelurahan Bapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir. (adv/kh/dra/ku6)

btn

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
Recovery Asset Sales KC Samarinda
Jl. KH Mas Mansyur No. 1 Samarinda
Telp (541) - 736100, 736102/736103/736105
Email: ra.samarinda@btn.co.id
www.btn.co.id

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN TERHADAP DEBITUR KPR BTN

Sehubungan dengan kredit KPR BTN dengan jaminan, maka dengan ini pihak BTN mengumumkan dan memanggil jaminan/agunan dengan debitur sebagai berikut :

1. Bahwa jaminan/agunan kredit Rumah Pribadi dengan melanggar pasal 14 dan 15 perjanjian kredit KPR BTN dikarena pemanfaatannya rumah yang menjadi agunan KPR BTN.
2. Bahwa jaminan/agunan kredit tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dan/atau untuk kepentingan lain selain untuk tinggal, dan dikarenakan tanpa ada pengumuman ini dan apabila debitur mengabaikan maka akan dilakukan penjualan barang agunan secara lelang dan "Pengosongan dengan cara paksa" dengan Jasa Juru Sita.
3. Bahwa konsekuensi dari dan mengabaikan maksud dan pemberitahuan ini maka pihak BTN akan melakukan tindakan hukum.
4. Pembayaran oleh pihak debitur dapat melalui kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Recovery and Asset Sales KC Samarinda Telp 0541-736111

Mohon dengan ini pihak-pihak di atas dapat melaksanakan pengumuman dan pemanggilan kepada Debitur yang namanya tercantum dibawah ini :

NO. DEBITUR	NAMA DEBITUR	ALAMAT AGUNAN	ALAMAT KTP	ALAMAT KANTOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Samarinda, 12 Juni 2024
Hormat kami
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
Recovery and Asset Sales KC Samarinda